



**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	2
A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Atas Penerapan Tata Kelola .....	2
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola .....	2
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.....	2
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris .....	3
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.....	4
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	4
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	4
D. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	4
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	4
E. Hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	4
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	4
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	4
F. Hubungan Keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	5
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	5
G. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	5
H. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah .....	5
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun .....	6
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	6
K. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) .....	6
L. Permasalahan hukum yang dihadapi.....	6
M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	7
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....	7
BAB III PENUTUP .....	8

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Unisritama, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan, maka Bank Unisritama wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12.SEOJK.03.2024 dan Peraturan Jasa Keuangan No.9.POJK.03.2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Penerapan Tata Kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank Unisritama. Hal Ini dilakukan terus menerus dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip prinsip Tata Kelola yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Unisritama berpedoman pada Prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

1. **Transparansi (Transparency)**, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independensi (Independency)**, adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (Fairness)**, adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, Bank Unisritama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan memuat informasi mengenai

1. ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR
2. kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi
3. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
4. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris
5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
6. frekuensi rapat Dewan Komisaris
7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah
8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana.

Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas kemudian disampaikan kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan OJK
2. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau (YLPI Riau)
3. Asosiasi BPR di Indonesia, dalam hal ini adalah PERBARINDO; dan
4. Pemangku kepentingan melalui situs web BPR, yakni pada [bprunisritama.com](http://bprunisritama.com)

Bank Unisritama akan terus menerus berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat, berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku.

1

## BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama
Alamat	Jl. Soekarno Hatta No. 3, Desa Kubang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Nomor Telepon	(0761) 63381
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian cukup dari Manajemen BPR.
Posisi Laporan	31 Desember 2025
Peringkat Komposit	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil nilai komposit penilaian self assessment daripada penerapan tata kelola PT. BPR Unisritama adalah "3" (cukup baik)

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

No	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi	
1	Nama	Nancy Tahar
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan tanggung jawab	Membawahi fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta fungsi audit internal
2	Nama	Parhan
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan tanggung jawab	Membawahi bagian operasional dan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan APU PPT PPPSPM

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut daripada Dewan Komisaris sebagai berikut.

1. Melaksanakan tindak lanjut untuk mencapai target laba RBB 2025 sebesar Rp. 1,499,660,642. Akan tetapi, Realisasi laba bruto yang tercapai adalah Rp.624.420.051, (dibawah target).Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Action plan penanganan kredit bermasalah, mapping penyebab kredit bermasalah, laporan pemantauan tunggakan secara harian, dan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah secara telah dilaksanakan dengan memanfaatkan kerjasama dengan Kantor Hukum dan penyelesaian melalui jalur hukum/litigasi, akan tetapi peningkatan NPL belum teratasi dengan efektif, ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi jumlah bakidebet kredit NPL dari tahun 2024 sebesar Rp. 1,604,106,391 hingga tahun 2025 menjadi Rp. 1,969,620,865 atau 222.43% melebihi dari target tahun 2024 sebesar Rp. 885,483,568
  - b. Pendapatan pada tahun 2025 mencapai Rp. 6,181,269,197, mencapai target sebanyak 102.25%, salah satunya dicapai melalui peningkatan BD Kredit dengan kerjasama Payroll Unisritama Terpadu dengan sekolah dan instansi dibawah naungan YLPI Riau, modifikasi produk krtedit seperti penurunan suku bunga kredit dari kompetitor, dan pengurangan biaya administrasi pelunasan dalam rangka top up kredit, serta promosi pada standing banner di selingkungan UIR. Akan tetapi dikarenakan biaya CKPN jauh melampaui target, laba akhir yang diperoleh BPR tidak mencapai target.
2. Direksi telah menjalankan penerapan program APU PPT PPPSPM sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada menjalankan kewajiban pelaporan kepada PPATK dan OJK serta sistem notifikasi apabila terdapat nasabah yang tercatat memerlukan pengkinian data hendak bertransaksi pada Teller.;
3. Direksi telah meriview kembali kelengkapan/pembaharuan pengaturan internal pada Bank, ditemukan masih terdapat beberapa pengaturan internal yang perlu dilengkapi dan diperbaharui, termasuk salah satunya adalah SOP Kegiatan Operasional BPR.
4. Direksi telah melakukan tindak lanjut komitmen pemeriksaan umum OJK 2025, melalui pemantauan fungsi kepatuhan yang dilaporkan secara periodik kepada Direksi, akan tetapi masih terdapat beberapa temuan berulang yang belum diselesaikan;

5. Direksi memastikan proses verifikasi status kawasan lahan sawit yang akan dibiayai WAJIB dilaksanakan untuk menghindari risiko penyaluran kredit pada lahan dengan status kawasan hutan lindung/ produksi yang tidak dapat ditanami kelapa sawit.
6. Direksi telah menyusun dan mengesahkan kebijakan dan prosedur CKPN Bank Tahun 2025 menggunakan acuan SAKEP, POJK Kualitas aset BPR, serta studi literatur yang memadai, sehingga beban CKPN tidak secara signifikan mengganggu tingkat kesehatan/ permodalan BPR.
7. Direksi telah mempertimbangkan prinsip tata kelola, serta manajemen risiko yang memadai dalam menjalankan kegiatan usahanya.
8. Direksi telah melakukan penyesuaian skala upah karyawan dengan mematuhi UMP terbaru,
9. Fungsi audit intern dan kepatuhan telah melaksanakan peran monitoring terhadap tugas dan tanggungjawab setiap unit kerja, tetapi tanggungjawab pelaksanaannya tetap pada Atasan langsung,

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi	
1	Nama	Rika Puspa Ayu
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan tanggung jawab	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
2	Nama	Eko Atmojo
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan tanggung jawab	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi :

Dalam agenda rapat dewan komisaris bersama dengan Direksi, Dewan komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut.

1. Tindak lanjut dalam rangka mencapai rencana target laba bruto RBB 2025 sebesar Rp. 1,499,660,642, yakni:
  - a. Melakukan upaya penurunan baki debit NPL, melalui jalur persuasif/penagihan atau restrukturisasi jika nasabah masih memiliki prospek kedepannya, sedangkan untuk nasabah yang masih mampu dan tidak memiliki iktikad baik agar dilakukan penyelesaian melalui proses litigasi
  - b. Meningkatkan pertumbuhan baki debit kredit di selingkungan YLPI Riau dengan strategi tertentu, salah satunya penawaran promo suku bunga kredit yang lebih rendah dari kompetitor, pengurangan biaya administrasi pelunasan dalam rangka top up kredit, promosi pada standing banner di selingkungan UIR/YLPI Riau, serta mapping data prospek guru dan pegawai SK100%/Honoror disetiap sekolah dibawah naungan YLPI Riau yang telah MoU/PKS Layanan PAYTU dengan BPR.
  - c. Menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi peningkatan baki debit kredit bermasalah.
2. Memaksimalkan penerapan program APU PPT PPPSPM, salah satunya melalui indikator *Red Flag* yang muncul saat nasabah yang perlu dikinikan hendak bertransaksi pada teller
3. Meriview kembali kelengkapan/pembaharuan pengaturan internal pada Bank, termasuk salah satunya review atas batas wewenang transaksi teller dan akses menu CBS teller terhadap informasi saldo simpanan nasabah, akses user ID dan password, dan pengaturan lainnya.
4. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan umum OJK 2025, melalui pemantauan fungsi kepatuhan atas tindak lanjut penyelesaian komitmen untuk dilaporkan secara periodik kepada Direksi, salah satunya adalah komitmen terkait penyaluran kredit sawit Tahun 2024.
5. Agar Direksi memastikan status kawasan lahan sawit yang akan dibiayai pada tahun 2025.
6. Agar Direksi berdiskusi dengan pengurus BPR lainnya terkait dengan perhitungan CKPN serta memastikan kesiapan vendor dalam memproses perhitungan CKPN secara otomatis melalui CBS.
7. Pelaksanaan tata kelola secara penuh dan konsisten, serta melakukan langkah-langkah perbaikan profil risiko.
8. Penyusunan draft serta simulasi skala upah dengan mematuhi UMP terbaru,
9. memberdayakan audit intern dan kepatuhan dalam monitoring terhadap tugas dan tanggungjawab setiap unit kerja, meningkatkan pertumbuhan baki debit kredit,

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite BPR tidak memiliki komite.

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nancy Tahar	Rp 0	0%	Rp 0	0%
2.	Parhan	Rp 0	0%	Rp 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Direksi tidak memiliki saham di BPR.					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rika Puspa Ayu	Rp 0	0%	Rp 0	0%
2.	Eko Atmojo	Rp 0	0%	Rp 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR.					

**D. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nancy Tahar	-	-	0%
2.	Parhan	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rika Puspa Ayu	-	-	0%
2.	Eko Atmojo	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain				

**E. Hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nancy Tahar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Parhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
tidak ada hubungan keuangan diantara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rika Ayu Puspa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eko Atmojo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
tidak ada hubungan keuangan diantara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

**Hubungan Keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nancy Tahar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Parhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rika Ayu Puspa	Tidak ada	Tidak ada	Imam Ghazali - Suami
2.	Eko Atmojo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
terdapat hubungan keluarga diantara Komisaris Utama (Rika Puspa Ayu) dengan pemegang saham An. Imam Ghazali				

**G. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	416,100,000	2	208,050,000
2.	Tunjangan	2	69,350,000	2	34,675,000
3.	Tantiem	0	83,349,872	0	41,674,936
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi			568,799,872		284,399,936
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
Total fasilitas lain			0		0
Total remunerasi dan fasilitas lain			568,799,872		284,399,936
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS pada 20 Maret 2017, dengan besar Honorarium yang diterima oleh Direksi mengacu kepada RUPS pada tanggal 15 Desember 2022. pada tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh tantiem dari laba tahun 2024					

**H. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah**

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan rasio gaji pegawai yang terendah (b)	2.23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.20
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.34
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Penetapan mengenai Honorarium yang diterima oleh Direksi mengacu kepada RUPS PT. BPR Unisritama pada tanggal 15 Desember 2022, sedangkan untuk gaji pegawai ditetapkan melalui SK Direksi No. 14/SK/XI/2025 dan telah sesuai dengan SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.	

**Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20/3/2025	4	realisasi RBB Februari 2025, tindaklanjut peningkatan baki debit kredit, penurunan NPL, pengendalian internal dan Audit, penerapan tata kelola, manajemen risiko, APU PPT PPPSPM, CKPN, komitmen exit meeting OJK
2.	12/6/2025	4	realisasi RBB Mei 2025, tindaklanjut peningkatan baki debit kredit, penurunan NPL, SOP Penggunaan User ID, Review SOP, komitmen exitmeeting OJK
3.	2/7/2025	7	realisasi RBB 2025 TW2, Tindaklanjut peningkatan bakidebet kredit, penurunan NPL, komitmen exit meeting OJK, APU PPT PPPSPM, Hasil penilaian tatakelola
4.	17/9/2025	4	Tindak lanjut rencana aksi korporasi untuk perubahan kegiatan usaha menjadi Syariah
5.	1/10/2025	4	realisasi RBB 2025 TW3, Tindak lanjut NPL, Penyesuaian skala upah terhadap UMK 2025, Komitmen exit meeting OJK, APU PPT PPPSPM, hasil penilaian tata kelola
6.	5/12/2025	4	RBB 2026, realisasi RBB 2025

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan secara fisik selama tahun periode Januari 2025 s/d Desember 2025 dengan memperhatikan SK Direksi No. 15/SK/VI/2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Komisaris.

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Rika Puspa Ayu	6	0	100%
2	Eko Atmojo	6	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

seluruh anggota dewan komisaris mendatangi seluruh rapat secara fisik

**K. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal *) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

tidak terdapat temuan fraud pada tahun 2025

**L. Permasalahan hukum yang dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut :

tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2025

**M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :							
tidak terjadi transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan selama tahun 2025							

**N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	31/1/2025	Sosial	Sponsorship Rektor UIR Tennis Tournamen	Univesitas Islam Riau	250,000
2.	5/2/2025	Sosial	Dana bantuan proposal jelang ramadhan FKIP UIR	Univesitas Islam Riau	250,000
3.	5/2/2025	Sosial	Dana bantuan proposal SDIP YLPI	SD Islam Plus YLPI Riau	25,000
4.	25/3/2025	Sosial	Bantuan dana masjid As Sajadah	Masjid As Sajadah	150,000
5.	26/3/2025	Sosial	Bantuan dana proposal isyarat Al-Quran	Univesitas Islam Riau	150,000
6.	16/5/2025	Sosial	Qurban Unisritama di Masjid Munawwaroh	Masjid Munawwaroh	2,800,000
7.	2/7/2025	Sosial	Bantuan dana pendidikan UPZ UIR	Univesitas Islam Riau	500,000
8.	6/8/2025	Sosial	Bantuan dana proposal kegiatan inter university Net	Univesitas Islam Riau	250,000
9.	11/8/2025	Sosial	Proposal 17 Agustus Desa Kubang Jaya	RT 01 Desa Kubang	150,000
10.	2/10/2025	Sosial	Sumbangan kegiatan pramuka Akbar SMP YLPI	SMP YLPI Riau	250,000
11.	14/10/2025	Sosial	Seminar internasional ICASS 2 Faperta UIR	Univesitas Islam Riau	250,000
12.	4/11/2025	Sosial	Bantuan dana proposal Harmoni Perj	Univesitas Islam Riau	250,000
13.	1/12/2025	Sosial	Proposal Market Day TK YLPI Marpoyan	TK YLPI Marpoyan	200,000

### BAB III PENUTUP

Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Manajemen dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan usaha Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola tahun buku 2025, PT. BPR Unisritama memperoleh **peringkat komposit 3 (cukup baik)**. Peringkat ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola telah diimplementasikan secara memadai, meskipun masih terdapat kelemahan yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lanjutan dari Manajemen agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan dan kesehatan Bank.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan Tata Kelola bukanlah suatu kondisi statis, melainkan proses yang harus terus ditingkatkan seiring dengan perubahan lingkungan usaha, peraturan perundang-undangan, serta ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PT. BPR Unisritama senantiasa berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal, efektivitas fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Menyempurnakan struktur organisasi dan prosedur kerja sesuai prinsip-prinsip prudensial perbankan;
4. Mendorong budaya kerja yang berlandaskan pada integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil audit eksternal maupun internal secara tepat waktu dan efektif.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Bank Unisritama berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tata Kelola sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berintegritas.

Kampar, 21 April 2026

PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama

  
**Parhan, SE, MM**  
Direktur



  
**Nancy Tahar, SE**  
Direktur Utama